

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan Taufik dan Hidayah-nya jualah kami telah berhasil menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2025 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan.

LPPD ini dimaksudkan sebagai bahan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran.

LKPJ ini dimaksudkan sebagai bahan masukan untuk pembuatan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD dan LKPJ ini memuat visi, misi prioritas dan sasaran pelaksanaan kegiatan, alokasi dan realisasi anggaran dari masing-masing kegiatan, hasil yang telah dicapai serta permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya.

Kami berharap, laporan ini dapat memberikan informasi yang diperlukan sekaligus juga sebagai bahan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi SKPD dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan umumnya pada tahun-tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik dalam pelaksanaan program maupun dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan adanya kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kebaikan dan kemajuan dalam pelaksanaan program kedepan, dan kepada semua pihak yang sudah membantu dalam penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Banjarbaru, Januari 2026

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Kalimantan Selatan,

ENDRI, AP, M. AP
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 19750821 199412 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.....	1
1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	1
1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome).....	2
1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan.....	2
1.4 Kebijakan Strategis yang Dilaksanakan	6
1.4.1 Isu Strategis Organisasi	6
1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025.....	11
BAB II CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (DEKONSENTRASI)	31
2.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Tugas Pembantuan	31
2.2 Instansi Pemberi Tugas Pembantuan	31
2.3 Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran	31
2.4 Permasalahan dan Kendala.....	33
2.5 Saran dan Tindak Lanjut	33
BAB III CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL.....	34
3.1 Jenis Pelayanan Dasar	34
3.2 Alokasi dan Realisasi Anggaran	34
3.3 Dukungan Personil	37
3.5 Permasalahan dan Solusi	39
BAB IV TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD.....	40
BAB V PENUTUP	41
BAB VI LAMPIRAN	42

DAFTAR TABEL

Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output).....	1
Indikator Kinerja Kunci Hasil (OUTCOME)	2
Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong	8
Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan.....	12
Indikator dan Target Capaian Kinerja	13
Indikator Kinerja Kinerja Daerah	14
Sasaran Strategis dan Indikator	14
Indikator, Kinerja, Target dan Realisasi 2024 & 2025	15
Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat	16
Capaian Kinerja DPMPTSP	16
Indikator Kinerja Sesuai RPJMD dan Renstra	18
Rekapitulasi Indikator Kinerja Utama.....	24
Realisasi Belanja DEKON Tahun Anggaran 2025	32
Realisasi Belanja APBN (DAK) Tahun Anggaran 2025	33
Realisasi Anggaran DPMPTSP Tahun Anggaran 2025.....	34
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan	38
Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat Golongan	38
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional.....	39

BAB I

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Capaian Indikator Kinerja Kunci Keluaran (Output)

Berdasarkan dari IKK Provinsi Permendagri No. 18 Tahun 2020 Tentang Indikator Kinerja Kunci keluaran (Output) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu terdiri dari :

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
Urusan Penanaman Modal				
1	PERDA mengenai pemberian fasilitasi/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah provinsi	Peraturan Daerah Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi	- 3 Perda	Daftar terlampir
2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal	✓ Draft SOP Insentif Kemudahan Pemberian Fasilitas/insentif	- 1 draft	
3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitasi/insentif penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	Terlaksananya kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	2 Kali	Daftar kegiatan terlampir
5	Kegiatan pameran penanaman modal	Terlaksananya kegiatan pameran penanaman modal	5 Kali	Daftar kegiatan terlampir
6	Kegiatan penerimaan misi penanaman modal		Tidak Ada Kegiatan	
7	Konsultasi perizinan dan non perizinan penanaman modal	Tersedianya sarana dan prasarana konsultasi dan pegaduan ; terlaksananya pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal	✓ Secara tatap muka 2132 kali ✓ Secara online 248 kali	Bukti terlampir
8	Penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal	Perizinan Penanaman modal digantikan dengan perizinan Berusaha: ✓ NIB ✓ Perizinan sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Penerbitan : NIB: 67.481 Perizinan: 291 Izin	Data terlampir
9	Laporan realisasi penanaman modal	Tersedia pers rilis investasi Kalimantan selatan Januari - September tahun 2025 Total : Rp. 25,65 T	1 laporan	Data terlampir

No	IKK OUTPUT	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
10	Pembinaan aparatur penanaman modal tingkat provinsi serta kabupaten/kota	Terlaksananya Bimtek penanaman modal kepada aparatur dan penanaman modal di provinsi kalimantan selatan	2 Kali Bimtek	Data terlampir
11	Pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	Terlaksananya pembinaan penanaman modal PMA dan PMDN	2 Kali Pembinaan	Data terlampir
12	Tersedianya data dan informasi dan non perizinan provinsi	Tersedia pada website, dan Simapan, Bekantan	2 media	Bukti terlampir

1.2 Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)

Indikator Kinerja Kunci keluaran (Outcome) terdiri dari :

No	IKK OUTCOME	Jenis Data	Capaian Kinerja	Keterangan / Data Dukung yang dibutuhkan
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	(Jumlah investasi tahun n- jumlah investasi tahun n-1) di provinsi	25.65T – 24.85T	FC Daftar rincian realisasi PMDN tahun 2024 dan 2025 pada ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		Jumlah investasi tahun n-1 di provinsi	24.85T	

1.3 Capaian Pelaksanaan Program dan Kegiatan

DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan pada Tahun Anggaran 2025 melaksanakan sebanyak 7 (tujuh) program pembangunan yang terdiri dari 1 (satu) program rutin (kesekretariatan) dan 6 (enam) program Urusan Penanaman Modal sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi;
2. Program Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
3. Program Pengendalian Penanaman Modal;
4. Program Promosi Penanaman Modal;
5. Program Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
6. Program Perizinan Infrastruktur dan Sosial; dan
7. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Adapun Program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun anggaran 2025 telah dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan seperti yang telah direncanakan. Namun untuk mengetahui sampai sejauh mana program dan kegiatan tersebut dilaksanakan perlu dilakukan evaluasi kinerja. Pada tahun anggaran 2025, DPMPTSP Prov.Kalsel

melaksanakan 7 (tujuh) Program yang terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan serta 36 (tiga puluh enam) sub kegiatan. Adapun Tingkat pencapaian program dan kegiatan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 85.72% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub. Kegiatan :
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (fisik) 100,00%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (fisik) 100,00%
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 100,00%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi (fisik) 100,00%
 - Sosialisasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang – Undangan (fisik) 100,00%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Komponen Instansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Cetak dan Pengadaan (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan (fisik) 100,00%
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (fisik) 100,00%

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100% dengan sub. Kegiatan:
 - Pengadaan Mebel (fisik) 100,00%
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (fisik) 100,00%
6. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyedia Jasa Surat Menyurat (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (fisik) 100,00%
 - Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor (fisik) 100,00%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (fisik) sebesar 100,00% dengan sub. Kegiatan:
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%
 - Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya (fisik) 100,00%

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 88.18% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
 - Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal (fisik) 100,00%
2. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi (fisik) 100,00%
 - Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi (fisik) 100,00%

3. Program Promosi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 96,46% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Promosi (fisik) 100,00%
 - Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi (fisik) 100,00%.

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 86,81% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Menjadi Kewenangan Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (fisik) 100,00%.
 - Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah (fisik) 100,00%.

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 83,79% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi (fisik) sebesar 100,00%, dengan sub kegiatan:
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal (fisik) 100,00%.

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Realisasi pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan selama kurun waktu Tahun Anggaran 2025 sebesar 90,40% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :

1. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi(fisik) sebesar 100,00% , dengan sub. Kegiatan:
 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (fisik) 100,00%.

1.4 Kebijakan Strategis Yang Dilaksanakan

1.4.1 Isu Strategis Organisasi

Ditinjau dari tugas dan fungsinya, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari unsur pelayanan dan investasi. Perlu dilakukan suatu analisis terhadap permasalahan-permasalahan serta isu-isu strategis.

Gambaran isu dan kondisi yang ada sebagai berikut:

- ✓ Kondisi perekonomian global, mengalami perlambatan ekonomi
- ✓ Investasi di kalsel masih relative menarik dan potensial untuk dikembangkan
- ✓ Kalsel sebagai Gerbang Ibukota Negara
- ✓ Hilirisasi Industri
- ✓ Pelaksanaan Pelayanan Publik terkait Perizinan dan Nonperizinan

Adapun beberapa permasalahan umum yakni :

1. Peningkatan kinerja penanaman modal untuk menarik investor ke Kalimantan Selatan, melalui :
 - A. Analisis dan penelitian tentang kondisi dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi investor apabila ingin berinvestasi di Kalimantan Selatan
 - B. Mengkoordinasi permasalahan-permasalahan investasi diatas, untuk diclearkan, atau minimal dikurangi

- C. Meningkatkan sinergi pemangku kepentingan dalam upaya peningkatan investasi di Kalimantan Selatan
 - D. Membuat rencana tindak peningkatan investasi di Kalimantan Selatan.
2. Peningkatan kinerja pelayanan untuk kemudahan perizinan dan kualitas yang lebih baik.

Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, perumusan isu strategis tersebut dilakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok serta fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mempunyai tugas mengordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan perizinan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, sedangkan fungsi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan antara lain adalah sebagai perumusan kebijakan teknis penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan dan Nonperizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, keamanan, dan kepastian dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya, dari tugas dan fungsi tersebut, maka permasalahan yang masih menjadi tantangan dalam operasional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- 1) Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;
- 2) Masih sedikit identifikasi data potensi daerah;
- 3) Sinkronisasi perencanaan dan kebijakan penanaman modal;
- 4) Belum optimalnya promosi investasi;
- 5) Ketidakmerataan penanaman modal;

- 6) Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM;
- 7) Data PMA/PMDN tidak sinkron antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- 8) Menuju pelayanan prima;
- 9) Terbatasnya sumber daya manusia;
- 10) Sarana dan prasarana belum optimal;
- 11) Sistem informasi pelayanan belum optimal;
- 12) Keterbatasan Anggaran.

Tabel Permasalahan Pelayanan SKPD dan Pendorong

Permasalahan Pelayanan SKPD	Pendorong
- Belum optimalnya promosi investasi - Belum teridentifikasinya data potensi daerah - Ketidakmerataan penanaman modal - Pelayanan belum optimal - Masih kurangnya kesadaran perusahaan akan kewajibannya menyampaikan LKPM. - Data PMA/PMDN tidak sinkron antara pusat, provinsi dan kab/kota - Sinkronisasi Perencanaan - Belum seluruh daerah di Provinsi Kalimantan Selatan menyusun RUPM;	- Kejelasan visi jangka panjang Kalimantan Selatan - Ketersediaan lahan dan komoditi unggulan - Kondusifnya situasi sosial masyarakat dan keamanan - Wilayah bebas dan ancaman gempa bumi dan letusan gunung merapi - Kesiapan kelembagaan penanaman modal - Kesiapan aparatur pemerintah yang berkomitmen

Penentuan Isu-isu Strategis

Dari berbagai identifikasi masalah dan hasil telaahan diatas, maka isu strategis dalam penyelenggaraan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan lima tahun ke depan adalah:

1. Belum optimalnya investasi di Kalimantan Selatan; dan
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan

1.4.2 Tujuan dan Sasaran Renja Tahun 2025

A. Rencana Strategis

Perumusan visi dan misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 merupakan salah satu tahap penting dalam penyusunan Rencana Strategis SKPD sebagai hasil dari analisis sebelumnya. Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi

saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Pernyataan visi yang artikulatif akan memberikan arah yang jelas bagaimana mencapai masa depan yang diharapkan dan mengatasi kesenjangan yang terjadi. Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

Bahwa Visi dan Misi setiap SKPD di lingkup Provinsi Kalimantan Selatan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stakeholder. Visi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 adalah :

“Visi KALSEL BEKERJA Berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera”

Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 :

Misi untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Misi 3 dan Misi 5 yaitu Misi 3 Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkelanjutan, Merata, Dan Syariah dan Misi 5 Tata Kelola Pelayanan Publik Yang Mudah & Cepat Tujuan dan Sasaran SKPD

Dalam menentukan tujuan dan sasaran SKPD harus mengacu pada Visi dan Misi RPJMD. Penetapan tujuan dan sasaran perlu mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki segenap sumber daya dalam organisasi. Seluruh sumber daya dalam organisasi harus mempunyai kompetensi daya saing tinggi untuk mencapai tujuan.

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan yang dirumuskan merupakan gambaran tentang keadaan yang diinginkan oleh SKPD selama kurun waktu lima tahun ke depan, berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, serta sebagai upaya mendukung pencapaian Pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan seperti yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026. Tujuan dan sasaran ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan

visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Untuk itu tujuan disusun guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih dari setiap misi.

Adapun Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan sesuai RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026 mengacu pada Misi III dan Misi V.

Adapun keterkaitan visi, misi, tujuan, dan sasaran digambarkan sebagai berikut:



Kondisi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Program dan Kegiatan

KONDISI AWAL DAN ISU	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM /KEGIATAN
Kondisi Melanjutkan Hilirasasi dan mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di dalam Negeri Isu 1) Belum optimalnya investasi di Kalsel 2) Belum optimalnya pelayanan perizinan dan nonperizinan	Tujuan ✓ Meningkatnya Laju Pertumbuhan Investasi yang Mendukung Perekonomian Sasaran ✓ Meningkatnya Realisasi Investasi dalam dan Luar Negeri Strategi ✓ Pengembangan Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi ✓ Integrasi Ekonomi Domestik dan Global dengan Sistem Logistik yang Andal ✓ Pemantapan Pelayanan Publik	✓ Pembangunan dan pengembangan Kalimantan Selatan sebagai daerah mitra dalam mendukung superhub ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing ✓ Peningkatan daya saing daerah ✓ Peningkatan kualitas pelayanan publik masyarakat, termasuk kecepatan respon terhadap laporan Masyarakat ✓ Peningkatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :: a) Penetapan Pemberian Fasilitas /Intensif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi b) Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi 2. Program Promosi Penanaman Modal a) Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Provinsi 3. Program Pelayanan Penanaman Modal b) Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal A. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Provinsi 5. Program Pengelolaan Data dan Sistem informasi Penanaman Modal B. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi

B. Sasaran RPJMD

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kalimantan Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2021-2026, Sasaran utama penanaman modal yang ingin dicapai pada tahun 2026 yakni peningkatan investasi dan nilai IKM. kemudian ditetapkan 5 (lima) program prioritas urusan penanaman modal beserta Indikator dan targetnya sebagai berikut:

Program Prioritas	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja Akhir
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		
				Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	Target	(Juta. Rp)	
Urusan Penanaman Modal																
Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Rp	7.76 T	12.715 T	1.640	11.66 T	1.968	12.55T	2.362	13.52 T	2.834	14.55 T	3.401	15.67T	4.082	15.67T
Peningkatan Kualitas dan Kemudahan Pelayanan Perizinan	Indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Indeks	A (88.35)	A 88)	350	A (88.25)	1.500	A (88.50)	1.861	A (88.75)	1.952	A (89)	2.343	A (89.25)	2.821	A 89.25)

Selanjutnya ditetapkan juga indikator kinerja daerah pada urusan penanaman modal sebagai berikut:

Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD	Target Capaian					Kondisi Kinerja Akhir Periode RPJMD (2026)
			2022	2023	2024	2025	2026	
Realisasi Investasi PMA dan PMDN	Triliun Rp	12.715	11.66	12.55	13.52	14.55	15.67	15.67

Target realisasi investasi PMA dan PMDN adalah sebesar Rp14.55 triliun. Selain itu juga ditargetkan indeks kepuasan masyarakat (IKM) dengan predikat A (nilai 89).

C. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan ditentukan oleh seberapa jauh tingkat capaian dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori capaian kinerja dengan rentang capaian sebagai berikut:

- ✓ Lebih dari 90% untuk kategori capaian Sangat Memuaskan;
- ✓ 80% s/d 90% untuk kategori capaian Memuaskan;
- ✓ 70% s/d 80% untuk kategori capaian Sangat Baik;
- ✓ 60% s/d 70% untuk kategori capaian Baik;
- ✓ Diatas 50% s/d 60% untuk ketegori capaian Cukup;
- ✓ Kurang dari 50% untuk kategori capaian Kurang;

Sasaran strategis dan indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan yang telah direncanakan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : • Meningkatnya Realisasi Investasi dalam dan Luar Negeri	Peningkatan Investasi dengan indikator : 1. Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)
	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator : 2. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Terdapat 1 (satu) sasaran strategis pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan 2 (dua) indikator didalamnya, dimana salah satunya menjadi indikator kinerja daerah sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan 2021-2026.

Dalam perencanaan program kerja tahun 2025, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan telah menetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan. Kelompok indikator input terdiri dari besarnya dana yang digunakan untuk membiayai suatu kegiatan dihitung dengan satuan rupiah. Sedangkan indikator output merupakan hasil yang langsung diperoleh ketika kegiatan selesai dilaksanakan, jenisnya bervariasi tergantung pada jenis kegiatannya.

Indikator outcome merupakan indikator yang terbentuk karena adanya output, yang bisa berupa pemanfaatan output yang dapat diukur dalam jangka pendek (intermediate outcome). Untuk menilai atau mengukur capaian kinerja, menggunakan tolok ukur indikator sasaran yang melekat pada kegiatan.

Kinerja Utama pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Peningkatan Investasi dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dengan 2 (dua) indikator yakni: Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan Indeks kepuasan Masyarakat (IKM). Realisasi investasi PMA dan PMDN dengan capaian sampai dengan Triwulan IV tahun 2024 sebesar 24,85T atau 183.80% masuk dalam klarifikasi Memuaskan. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan capaian 94.25 atau 106.19% juga masuk dalam klarifikasi sangat memuaskan.

Indikator Kinerja, Target, dan Realisasi 2024 & 2025

No	Indikator Kinerja	Target 2024 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2024 dan % capaian	Target 2025 (sesuai RPJMD dan Renstra)	Realisasi 2025 dan % capaian
1	Realisasi Investasi PMA dan PMDN	13.520.000.000.000 TW.IV	24.850.710.277.905 (183.80%)	14.550.000.000.000 TW.IV	25.659.132.548.732 TW. III
2	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.75)	A (94.25) 106.19%	A (89)	A (91.50) 102.80%

Penjelasan

Indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) tahun 2024 dengan nilai A (88.75) dengan predikat A sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017. Sedangkan Tahun 2025 dengan nilai A (91.50). Adapun unsur penilaian sebagai berikut:

➤ Persyaratan ➤ Prosedur ➤ Waktu pelayanan ➤ Biaya/tarif ➤ Produk Layanan	➤ Kompetensi Pelaksana ➤ Perilaku pelaksana ➤ Sarana dan prasarana ➤ Penanganan pengaduan dan masyarakat
---	---

Analisa capaian kinerja berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dimana Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi

Kalimantan Selatan menetapkan 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) kinerja utama dan 2 (dua) indikator dengan target yang akan dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA	SUMBER DATA
1	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	14.550.000.000.000	25.659.132.548.732 TW. III Tahun 2025	176.35%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya. TW. III	Dinas PM dan PTSP Prov Kalsel, BKPM RI
2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89)	A (91.50)	102.80%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat	Dinas PM dan PTSP
Rata-rata Capaian					139.57%		

Penjelasan :

Pada Kinerja Peningkatan Investasi dengan indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN, tahun 2025 ditargetkan sebesar 14.55 triliun rupiah. Adapun realisasinya dari Januari – Oktober 2025 sebesar **25,65 triliun rupiah** sehingga capaian kinerja sebesar **176.35%**.

Rumus indikator realisasi investasi PMA dan PMDN yaitu Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya.

Pada Kinerja kedua yakni Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan

A dengan nilai 89. Adapun realisasinya adalah **A dengan nilai 91.50**, sehingga kinerja mencapai **102.80%**.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan;
- Pembagian kuisisioner kepada pelanggan.

Indikator kinerja sesuai RPJMD dan Renstra

INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL	2021			2022			2023			2024			2025			2026		
		TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN	TARGET	REAL	CAPAIAN
TARGET RPJMD KALSEL (RENSTRA DPMPPTSP PROV. KALSEL):																			
Realisasi Investasi (Rp.Triliun)	7.76	10.83	12.71	117.41%	11.66	10.66	91.42%	12.55	19.76	157.46%	13.52	24.85	183.80%	14.55	25.65	176.35	15.67	-	-
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (88.35)	B (85)	A (88)	TERCAPAI	A (88.25)	A (88.75)	TERCAPAI	A (88.50)	A (94.25)	TERCAPAI	A (88.75)	A (94.25)	TERCAPAI	A (89)	A (91.50)	TERCAPAI	A (89.25)	-	-

Pada indikator Realisasi Investasi PMA dan PMDN tahun 2025 ditargetkan sebesar **14.55 triliun rupiah**. Adapun realisasinya sampai pada **Triwulan III** (Januari – Oktober) sebesar **25.65 triliun rupiah**, sehingga kinerja mencapai **176.35%**.

Pada indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ditargetkan A dengan nilai 89. Adapun realisasinya adalah A dengan nilai 91.50, sehingga kinerja mencapai 102.80%.

Indikator DPMPTSP (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2023 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target **25.65** triliun rupiah.

Capaian realisasi investasi pada tahun 2025 sebesar **25.65** triliun rupiah atau **176.35%** sampai pada **Triwulan III** (Januari – Oktober). Realisasi investasi telah tercapai masuk kedalam klasifikasi sangat memuaskan dengan target yang telah ditetapkan. Disisi lain juga rencana investasi atau sering disebut juga dengan minat investasi (berdasarkan persetujuan/Izin prinsip/tanda daftar) mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan iklim investasi khususnya di Kalimantan Selatan semakin diminati dan bertumbuh kembang. Dengan kata lain Investor berminat untuk menanamkan modalnya di Kalimantan Selatan.

Indeks Kepuasan masyarakat (IKM) dilakukan dengan melaksanakan analisis survey kepuasan masyarakat (SKM) dengan langkah sebagai berikut:

- Menyediakan kotak saran, ruang pengaduan dan kuesioner survey Kepuasan Masyarakat;
 - ✓ Melalui Tatap Muka
 - ✓ Melalui SKM Online
- Diselesaikannya aduan/keluhan masyarakat terkait pelayanan perizinan Pembagian kuesioner kepada pelanggan Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja

Pada tahun 2025, target yang telah ditetapkan diperkirakan akan tercapai. Hal ini dikarenakan situasi yang sudah tercapai.

Upaya selanjutnya untuk pencapaian target **Realisasi** Investasi sebagai berikut :

1. Pengawasan Berkelanjutan kepada PMA & PMDN, didukung dengan APBD dan Dekonsentrasi APBN
2. Himbauan dan edaran pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)
3. Fasilitasi kepada perusahaan yang bermasalah atau mengalami kesulitan baik dalam pelaksanaan usahanya sampai dengan pelaporan kegiatannya yang berupa LKPM
4. Selalu berkoordinasi dengan Pemerintah pusat (BKPM RI) dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui DPMPTSP Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan
5. Promosi Investasi yang berkelanjutan, antara lain : pameran investasi, forum investasi, one-one meeting, dan lainnya.
6. Matchmaking dalam rangka kemitraan dunia usaha.
7. Penyusunan dokumen, kajian, serta kebijakan untuk peningkatan investasi
8. Inovasi SEJADI (Seberkas Jadi Dua Izin), agar izin yang semula tidak masuk skema penanaman modal menjadi masuk dari bagian penghitungan investasi, sehingga dapat memacu peningkatan realisasi investasi.
9. Gerai pelayanan perizinan di daerah dalam rangka memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan perizinan.
10. Perbaikan iklim investasi melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (OSS).
11. Penyederhanaan perizinan (pengurangan waktu, syarat, dan prosedur)
12. Peningkatan Standar Pelayanan dengan implementasi SMM ISO 9001:2015.

Indikator Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2024 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 pada urusan penanaman modal yakni: Realisasi Investasi dengan target 25.65 triliun rupiah, sasaran RPJMD sama dengan capaian kinerja eselon II.

Capaian realisasi investasi pada TW III (Januari – Oktober) tahun 2025 sebesar 25.65 triliun rupiah dari target tahun 2025 sebesar 14.55 Trilyun. Realisasi investasi mengalami penurunan.

Disisi lain, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan menunjukkan perbaikan. Hal ini dapat dilihat dari Indikator pengukur kepuasan masyarakat yakni Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2025 sebesar 91.50 dengan predikat A, sedangkan tahun 2025 A 89 sesuai Permenpan RB nomor 14 Tahun 2017.

Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan:

1. Penyesuaian persyaratan, spesifikasi, dan biaya/tarif yang mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.
2. Pendelegasian seluruh kewenangan perizinan dan nonperizinan lingkup pemerintah provinsi kepada DPMPTSP Prov.Kalsel sebanyak 7 bidang dan 145 jenis perizinan dan nonperizinan.
3. Pengelompokkan prosedural pengurusan perizinan dan nonperizinan menjadi 3 (tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP): 1. Dengan pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan, 2. Tanpa pertimbangan teknis dengan peninjauan lapangan, dan 3. Tanpa pertimbangan teknis tanpa peninjauan lapangan. Prosedural yang dibuat adalah untuk kemudahan dan kenyamanan masyarakat dalam berurusan. Telah dilakukan pemangkasan proses untuk menciptakan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
4. Konsistensi implementasi maklumat pelayanan yang menyatakan bahwa aparat menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan publik, dan apabila tidak ditepati, siap menerima sanksi yang berlaku.
5. Reward petugas pelayanan terbaik
6. Penyediaan dan Penambahan tenaga Front Officer
7. Tersedianya Help Desk
8. Implementasi perizinan secara online dengan Sistem Aplikasi Perizinan Online (SIMAPAN) dan Online Single Submission (OSS)
9. Digital Signature untuk percepatan dan kemudahan perizinan nonperizinan.

10. Pembentukan Satuan Petugas Percepatan Pelaksanaan Berusaha Provinsi Kalimantan Selatan serta keaktifan didalamnya
11. Implementasi ISO 9001:2015

D. Program dan Kegiatan Penunjang Kinerja

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta prioritas pembangunan, Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024 yang mendukung pencapaian indikator kinerja daerah urusan penanaman modal adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - B. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akutansi SKPD
 - C. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
 3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- E. Pengadaan Barang Milik Daerah
 - 1. Pengadaan Mebel
 - 2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- F. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3. Penyediaan Jasa Umum Pelayanan Kantor
- G. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
 - 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Provinsi
 - 1. Penetapan Kebijakan Daerah Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Moda
 - 2. Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
 - B. Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
 - 1. Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi
 - 2. Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Provinsi
- 3. Program Promosi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 - 1. Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi
 - 2. Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi

4. Program Pelayanan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 1. Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
 2. Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
 3. Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan
 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah
 5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - B. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
 1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
 1. Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

E. Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi penetapan indikator kinerja utama

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
1	Kepala Dinas	Peningkatan Investasi	Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Rp)	14,55 Trilyun Rupiah	25.65 Trilyun Rupiah Data Triwulan III Januari - Oktober	176.35%	Angka realisasi investasi yang terdiri dari PMA dan PMDN dijumlahkan dalam satuan Rupiah (Rp) dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Adapun realisasi investasi didapat dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) setiap perusahaan. LKPM dibuat setiap triwulan, sehingga dapat terlihat perkembangan realisasi pelaksanaan investasinya. TRIWULAN III
		Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	A (89)	A (91,50)	102,80%	Analisis Survey Kepuasan Masyarakat
2	Sekretaris	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja SKPD	Nilai SAKIP DPMPTSP	A (83)	A (84.25)	101,51%	Persentase Nilai SAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Persentase Penyerapan Anggaran SKPD	85%	88.74%	104,40%	Persentase Kenaikan Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP
			Persentase Aset yang tercatat	100%	100%	100%	Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan SOPD
		Meningkatnya Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran Kepegawaian	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan SKPD	80%	80%	100%	Persentase pemenuhan pengurusan administrasi kepegawaian PNS SKPD Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham
			Persentase Pemenuhan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	100%	100%	100%	Persentase Aset yang tercatat (harus 100%) Persentase serapan anggaran SOPD
		Peningkatan Kualitas SDM SKPD	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham	100%	100%	100%	Persentase Peserta Pelatihan/Bimtek yang paham

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
3	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Perkantoran dan Kepegawaian	Persentase Surat Menyurat, Surat Keluar dan Arsip yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat
			Persentase Urusan Pemenuhan Rumah Tangga	100%	100%	100%	Jumlah Dokumen terkait administrasi kepegawaian
			Persentase Pemenuhan Bahan Analisa dan Evaluasi Organisasi dan Ketatalaksanaan	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
		Tersedianya Sarana dan Prasarana sesuai Kebutuhan SKPD	Persentase Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara Tertib	100%	100%	100%	Jumlah Pegawai yang Administrasi Kepegawaiannya dilayani secara tertib
			Jumlah Dokumentasi Penyediaan Sarana dan Prasarana	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Peserta Pelatihan / Bimtek yang paham
		Tersedianya Dokumen Kebutuhan Diklat	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah Dokumen Kebutuhan Diklat
4	Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Aset	Tersedianya Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD	Nilai Komponen Perencanaan pada LKIP DPMPTSP	28	25,39	90,68%	Nilai komponen pelaporan pada LKIP SKPD
			Nilai Komponen Pelaporan pada LKIP DPMPTSP	14	12,69	90,64%	Nilai komponen perencanaan pada LKIP SKPD
			Jumlah Dokumen Kinerja sesuai Ketentuan	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan secara berkala	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala
		Terlaksananya Pengelolaan Aset SKPD	Persentase Aset yang dikelola	100%	100%	100%	Jumlah Aset yang dikelola
5	Kabid Perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Persentase Realisasi pelaksanaan Kemitraan	100%	100%	100%	Jumlah Realisasi Pelaksanaan Kemitraan dibagi Jumlah Kemitraan Dunia Usaha x 100%
			Persentase Potensi Investasi dipromosikan	100%	100%	100%	Jumlah Potensi Investasi daerah yang dapat dipromosikan dibagi Jumlah Potensi Investasi di 13

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
		Pengembangan Perencanaan dan Deregulasi Penanaman Modal	Persentase Potensi Investasi yang berbasis Lingkungan	20%	20%	100%	Kab/Kota x 100%
			Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Jumlah jenis Potensi Investasi Daerah yang teridentifikasi Berbasis Lingkungan
			Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 %	100 %	100 %	Jumlah Realisasi Sektor Investasi dibagi Jumlah sektor Investasi pada RUPM x 100%
		Pengembangan Pemberdayaan Usaha	Jumlah Kemitraan dunia usaha	4 Kemitraan	4 Kemitraan	100%	Jumlah Kemitraan dunia usaha
6	Kabid Promosi Penanaman Modal	Peningkatan Calon Investor	Persentase peningkatan Calon Investor	30%	30%	100%	Pertumbuhaa Calon Investor = (Jumlah calon investor tahun beqjalan dikurang jumlah calon investor tahun lalu) dibagi jumlah calon investor tahun lalu x 100%
			Persentase promosi yang ditindaklanjuti	25%	25%	100%	Promosi yang ditindaklanjuti dibagi jumlah romosl an dilaksanakan x 100%
		Teridentifikasinya Promosi Investasi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	6 item	6 item	100%	Jumlah Media Promosi Investasi
			Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Seminar Bisnis, Forum dan One on One Meeting	3 kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan kegiatan promosi
		Terlaksananya Promosi Investasi	Persentase Potensi Investasi Daerah yang diminati	50%	50%	100%	Persentase Potensi Investasi yang diminati
			Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	3 Kali	100%	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase Permasalahan Perusahaan yang terselesaikan	100%	-	-	Jumlah penyelesaian permasalahan perusahaan dibagi jumlah permasalahan perusahaan x 100%
			Persentase Perusahaan yang Aktif dalam Investasinya	23%	35%	100%	Jumlah Perusahaan yang aktif (diawasi/diamati/diketahui) dibagi jumlah Perusahaan Penanaman Modal yang ada di Kalsel x 100%
7	Kabid Pengendalian dan Informasi PM						

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
			Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai target	55%	38,46%	69,93%	Jumlah Kabupaten/Kota yang Investasi Provinsi dibagi 13 Memenuhi Target Kabupaten/Kota x 100%
		Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan	295 Perusahaan	98,33%	Jumlah Perusahaan Penanaman Modal PMA dan PMDN yang melaksanakan kegiatannya sesuai target Perusahaan
			Laporan Realisasi Penanaman Modal	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	Laporan Realisasi Penanaman Modal
		Pembinaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid tepat waktu	400 Perusahaan	397 Perusahaan	99,25%	Jumlah Perusahaan yang menyampaikan LKPM dengan valid dan tepat waktu
			Persentase Kabupaten/Kota yang telah mengimplementasikan Kebijakan penanaman Modal terbaru	100%	-	-	Jumlah Kabupaten/Kota yang Telah Mengimplementasikan Kebijakan Penanaman Modal Terbaru dibagi 13 (Kabupaten/Kota) x 100%
8	Kabid Perizinan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	A (88.50)	A (94)	106,21%	Nilai IKM Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%	99,88%	110,98%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Pelayanan Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam yang dilayani	90 Jenis Izin	90 Jenis Izin	100%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam yang dilayani dibagi Jumlah Perizinan Bidang Ekonomi yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%

NO	Nama Jabatan	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN	CARA MENGHITUNG INDIKATOR KINERJA
9	Kabid Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Nilai IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	A (88.50)	A (93,75)	105,93%	Nilai IKM Bidang Infrastruktur dan Sosial
			Persentase Permohonan yang dilayani	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial sesuai SOP dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Persentase Usaha Berizin	90%	99,19%	110,21%	Jumlah Usaha Berizin dibagi jumlah usaha x 100%
		Peningkatan Pelayanan Perizinan Bidang Sosial	Persentase Pemenuhan Pelayanan (Dokumen Permohonan) Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	Jumlah Perizinan Bidang Sosial yang dapat diproses sesuai standar dibagi Jumlah Perizinan yang dimohonkan masyarakat x 100%
			Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Non Perizinan Bidang Sosial yang dilayani	55 Jenis Izin	55 Jenis Izin	100,00%	Jumlah Jenis Layanan Perizinan dan Nonperizinan Bidang Sosial yang dilayani
10	Kabid Pengaduan, kebijakan dan Informasi	Pelayanan, Pengaduan, Kebijakan dan Informasi	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan	A (88.50)	A (94.70)	107.01%	Nilai IKM penanganan (pelayanan) Pengaduan
		Pelayanan Data dan Sistem Informasi	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update	3 Sistem	3 Sistem	100%	Jumlah Sistem Informasi yang Berjalan dengan Lancar dan Data Informasi yang Update (terbaru)
		Pelayanan Pengaduan	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi jumlah pengaduan x 100%
			Persentase Pemenuhan pelayanan Investor	100%	100%	100%	Jumlah Pelayanan Investor dibagi Jumlah Permintaan Calon Investor x 100 %
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Konsultasi	100%	100%	100%	Jumlah Pemenuhan Layanan Konsultasi dibagi Jumlah Konsultasi (dari Masyarakat/Pemohon Ijin) x 100%

IV. Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya

Pada anggaran tahun sebelumnya tidak ada rekomendasi yang harus ditindak lanjuti.

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN						
NO	SKPD	PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT REKOMENDASI OLEH SKPD	PERMASALAHAN / HAMBATAN DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI	SOLUSI ATAS PERMASALAHAN / HAMBATAN
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Realisasi anggaran DPMPTSP tahun 2024 mencapai sekitar 88,7% dari pagu anggaran perubahan, dengan program promosi penanaman modal mencapai realisasi tertinggi (96,49%) dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terendah (83,79%). Perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi pada program dengan realisasi rendah agar anggaran dapat terserap optimal dan mendukung target investasi. Mengingat program promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal memiliki pagu dan realisasi yang cukup besar, disarankan untuk mempertahankan atau menambah alokasi anggaran pada kedua program ini. Kegiatan promosi seperti pameran, videotron, dan baliho terbukti efektif dalam menarik investor dan perlu diperkuat. Realisasi program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mencapai 90,4%. Mengingat pentingnya digitalisasi pelayanan perizinan berbasis risiko, anggaran untuk pengembangan sistem informasi perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk mendukung layanan yang lebih cepat dan transparan. Namun kendala yang sering terjadi adalah pertimbangan teknis dari dinas terkait sangat memakan waktu.	Catatan dan rekomendasi disusun berdasarkan analisis realisasi anggaran, capaian kinerja, serta identifikasi kendala dan peluang perbaikan sebagaimana tercantum dalam dokumen LKPJ 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yakni : - Memperkuat perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dengan pendekatan strategis, termasuk fasilitasi kemitraan dunia usaha dan penyusunan peta potensi investasi yang akurat dan up-to-date. - Melanjutkan dan mengembangkan pelayanan perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha serta memangkas waktu pertimbangan teknis di SKPD terkait. - Memperluas dan mengintensifkan promosi potensi daerah yang dapat menarik investasi, termasuk melalui media digital dan pameran, serta menggali potensi baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi daerah. - Memperkuat pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan efisiensi layanan khususnya menjawab keterlambatan pertimbangan teknis yang terjadi.	- Penyusunan Rencana Strategis, Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha, Penyusunan Peta Potensi Investasi yg up-to-date, Pengembangan Program Insentif, Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyempurnaan Regulasi - Semua perizinan dilakukan melalui OSS agar transparansi dan sebagai upaya pengawasan dan pengamanan harus di bentuk Lembaga Pengamanan Perizinan. - Promosi investasi akan dilakukan melalui media digital melalui penampilan video tron dan baliho di lokasi yang berpotensi investor luar negeri melihat di areal bandara soeta, bandara juanda serta bandara ngurah rai, untuk baliho akan di pasang di Jakarta, DPMPTSP juga akan membuat video potensi untuk persektor - Digitalisasi pada setiap tahapan proses perizinan di aplikasi SIMAPAN, Sebagai pelayanan publik di sektor perizinan yang sangat bergantung pada pasokan listrik dan layanan internet cepat, Pengelolaan data dan informasi masih belum optimal, termasuk penyajiannya	- Terbatasnya SDM dan Anggaran yg tersedia - Tidak adanya notifikasi/ pemberitahuan di menu oss terkait permasalahan yang masuk baik di akunt OPD Teknis dan DPMPTSP, Dalam hal penerbitan pertek dan lampiran teknis, pada beberapa OPD Teknis masih memerlukan Surat Pengantar / Permohonan dari DPMPTSP, Terdapat beberapa kekeliruan pengisian data kegiatan usaha yang diisikan oleh pelaku usaha yang masuk dalam rekapitulasi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Kalsel, contohnya pada pengisian data kegiatan usaha, tepatnya dipertanyakan "Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?" dijawab oleh pelaku usaha "Sudah" sehingga perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut berstatus "Masih Berlaku" namun sebenarnya pelaku usaha tidak/belum memiliki perizinan atas kegiatan usaha tersebut - Kurangnya anggaran untuk melaksanakan promosi investasi ke daerah yang berpotensi banyak investornya - Pertek dari SKPD teknis cenderung melebihi durasi waktu yang ditentukan, operator pengelola aplikasi yang memahami aplikasi perizinan, Pelayanan akan terganggu jika aliran listrik dan layanan internet tidak lancar, Keterbatasan secara kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi, Sarana dan prasarana pengolahan dan penyebarluasan informasi masih terbatas	- kapasitas dan kompetensi SDM serta Meningkatkan menambah anggaran biaya. - Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses perizinan, Tambahan menu dalam OSS - RBA supaya mempermudah pemohon izin, OPD Teknis dan DPMPTSP. - Menambahkan anggaran pada bidang promosi sehingga dapat melaksanakan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri - Penggunaan pertek secara online diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, Diperlukan lebih banyak bimbingan teknis bagi operator pengelola aplikasi pada DPMPTSP dan SKPD teknis serta panduan penggunaan aplikasi, Perlunya penambahan jalur listrik alternatif agar pelayanan bisa terus berjalan jika terjadi gangguan, Diperlukan lebih banyak bimbingan teknis bagi operator pengelola data dan informasi serta media sosial, Penambahan sarana dan prasarana pengolahan dan penyebarluasan informasi terutama di media sosial

BAB II

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN DEKONSENTRASI

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi
 - A. Tugas Pembantuan Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - a. Peraturan Menteri Investasi/BKPM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelimpahan dan Pedoman Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri
 - c. DIPA Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA Nomor 010.04.3.484172/2024 Tanggal 24 November 2023 Program Kapasitas Pemerintahan Daerah dan Desa
 - d. DIPA Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA 065.01.3.159002/2024 Tanggal 14 Maret 2024 Program Penanaman Modal Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
 - B. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - a. Peraturan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pertunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Fasilitas Penanaman Modal Tahun Anggaran 2022.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
 - A. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi (Dekonsentrasi)
 - a. Kementerian Investasi / BKPM RI
 - b. Kementerian Dalam Negeri
 - B. Dana Dekonsentrasi Pusat yang Dilaksanakan oleh Daerah Provinsi DAK Fisik dan Non Fisik (APBN DAK)
 - a. Kementerian Investasi / BKPM RI
3. Realisasi Program dan Kegiatan Beserta Anggaran :
Pada Tahun 2025 Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Dekonsentrasi tidak ada Kegiatan

BAB III

CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

1. Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 610/9803/Bangda tanggal 20 Desember 2017 tentang pelaporan capaian penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dimana tidak terdapat SPM pada urusan Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran

2.1 Alokasi

Alokasi anggaran pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 sebesar Rp. 24.319.725.900 (100%) sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp. 21.559.970.371 (88.65%). Sedangkan realisasi fisik berupa output kegiatan sebesar 100%.

2.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Belanja Langsung DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
XXX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			17.400.581.500	71.55	100	100	100	88.03	17.400.581.500	15.318.565.214	
XXX.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			846.826.000	3.48	100	100	100	88.84	846.826.000	752.330.416	
XXX.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	544.883.300	2.24	100	100	100	86.3	544.883.300	470.238.755	3 Dokumen
XXX.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pelaksanaan Rakor SAKIP	1 Kali	206.015.900	0.85	100	100	100	94.83	206.015.900	195.360.703	1 Kali
		Jumlah Dokumen Kinerja Sesuai Ketentuan	3 Dokumen				0					3 Dokumen
XXX.01.1.01.08	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Dokumen	47.606.700	0.2	100	100	100	86.7	47.606.700	41.273.958	1 Dokumen
XXX.01.1.01.10	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	: Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	48.320.100	0.2	100	100	100	94.07	48.320.100	45.457.000	1 Dokumen
XXX.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			9.048.853.400	37.21	100	100	100	85.74	9.048.853.400	7.758.830.509	
XXX.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan	8.726.410.000	35.88	100	100	100	85.59	8.726.410.000	7.469.112.947	14 Bulan
XXX.01.1.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen	172.240.000	0.71	100	100	100	90.73	172.240.000	156.280.000	1 Dokumen
XXX.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			830.600.000	3.42	100	100	100	84.83	830.600.000	704.612.061	
XXX.01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta	Jumlah Paket Pakaian	90 Steel	42.750.000	0.18	100	100	100	99.4	42.750.000	42.494.400	90 Steel

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
	Atribut Kelengkapannya	Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya										
X.XX.01.1.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	65 Orang	711.032.000	2.92	100	100	100	86.22	711.032.000	613.076.261	65 Orang
X.XX.01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-	100 Orang	26.830.000	0.11	100	100	100	63.12	26.830.000	16.935.000	100 Orang
X.XX.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undanga	4 Orang	49.988.000	0.21	100	100	100	64.23	49.988.000	32.106.400	4 Orang
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.227.683.900	5.05	100	100	100	88.82	1.227.683.900	1.090.435.368	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	59.162.200	0.24	100	100	100	97.24	59.162.200	57.528.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	107.378.800	0.44	100	100	100	96.55	107.378.800	103.672.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Bulan	22.207.900	0.09	100	100	100	76.55	22.207.900	17.000.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Bulan	45.800.000	0.19	100	100	100	95.01	45.800.000	43.515.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Bulan	243.289.000	1	100	100	100	99.99	243.289.000	243.264.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Bulan	749.846.000	3.08	100	100	100	83.41	749.846.000	625.456.368	12 Bulan
X.XX.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			2.552.475.700	10.5	100	100	100	92.71	2.552.475.700	2.366.437.104	
X.XX.01.1.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	9 Unit	1.921.110.000	7.9	100	100	100	90.84	1.921.110.000	1.745.070.001	9 Unit
X.XX.01.1.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	43 Unit	250.000.000	1.03	100	100	100	97.71	250.000.000	244.278.850	43 Unit
X.XX.01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	29 Unit	381.365.700	1.57	100	100	100	98.88	381.365.700	377.088.253	29 Unit
X.XX.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.011.265.500	4.16	100	100	100	86.61	1.011.265.500	875.854.726	
X.XX.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Bulan	15.000.000	0.06	100	100	100	100	15.000.000	15.000.000	12 Bulan
X.XX.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Bulan	406.000.000	1.67	100	100	100	77.22	406.000.000	313.529.073	12 Bulan
X.XX.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Bulan	590.265.500	2.43	100	100	100	92.73	590.265.500	547.325.653	12 Bulan
X.XX.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			1.227.683.900	5.05	100	100	100	88.82	1.227.683.900	1.090.435.368	
X.XX.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	59.162.200	0.24	100	100	100	97.24	59.162.200	57.528.000	12 Bulan
X.XX.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Bulan	107.378.800	0.44	100	100	100	96.55	107.378.800	103.672.000	12 Bulan
X.XX.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			1.882.877.000	7.74	100	100	100	94.01	1.882.877.000	1.770.065.030	

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember							
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit	
						S	R	S	R	S	R		
X.XX.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit	873.628.000	3.59	100	100	100	94.7	873.628.000	827.290.424	24 Unit	
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Pekerjaan	819.799.000	3.37	100	100	100	95.72	819.799.000	784.721.006	3 Pekerjaan	
X.XX.01.1.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	79 Unit	189.450.000	0.78	100	100	100	83.43	189.450.000	158.053.600	79 Unit	
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL			2.243.674.800	9.23	100	100	100	90.46	2.243.674.800	2.029.522.129		
2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			211.636.000	0.87	100	100	100	82.25	211.636.000	174.064.850		
2.18.02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Data Fasilitas/Kemudahan PM Kab/Kota se Kalimantan Selatan	1 Dokumen	90.761.000	0.37	100	100	100	80.27	90.761.000	72.851.550	1 Dokumen	
2.18.02.1.01.03	Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	Jumlah Kemitraaan Dunia Usaha	4 Kemitraan	120.875.000	0.5	100	100	100	83.73	120.875.000	101.213.300	4 Kemitraan	
2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi			2.032.038.800	8.36	100	100	100	91.31	2.032.038.800	1.855.457.279		
2.18.02.1.02.01	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi	Persentase Kesesuaian RUPM dengan Sektor Investasi	100 Persen	299.717.000	1.23	100	100	100	66.36	299.717.000	198.890.000	100 Persen	
2.18.02.1.02.03	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)	Data Potensi Investasi Kab/Kota se Kalimantan Selatan	1 Dokumen	260.798.000	1.07	100	100	100	76.51	260.798.000	199.532.279	1 Dokumen	
2.18.02.1.02.05	Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi	Kajian Invesment Project Ready to Offer (IPRO)	4 Dokumen	1.471.523.800	6.05	100	100	100	99.02	1.471.523.800	1.457.035.000	4 Dokumen	
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL			1.650.329.900	6.79	100	100	100	95.26	1.650.329.900	1.572.028.052		
2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.650.329.900	6.79	100	100	100	95.26	1.650.329.900	1.572.028.052		
2.18.03.1.01.02	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Item Media Promosi Investasi	10 Item	1.465.667.300	6.03	100	100	100	96.52	1.465.667.300	1.414.646.952	10 Item	
2.18.03.1.01.03	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Pelaksanaan Promosi Investasi	3 Kali	184.662.600	0.76	100	100	100	85.23	184.662.600	157.381.100	3 Kali	
X.XX.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Pekerjaan	819.799.000	3.37	100	100	100	95.72	819.799.000	784.721.006	3 Pekerjaan	
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL			1.421.475.800	5.84	100	100	100	89.5	1.421.475.800	1.272.302.790		
2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi			1.421.475.800	5.84	100	100	100	89.5	1.421.475.800	1.272.302.790		
2.18.04.1.02.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Peninjauan Lapangan untuk Syarat Teknis Perizinan dan Evaluasi	1 Dokumen	971.433.400	3.99	100	100	100	89.4	971.433.400	868.484.840	1 Dokumen	
2.18.04.1.02.06	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Sosialisasi Penyediaan Pelayanan dan Pengelolaan Konsultasi Perizinan Berbasis Risiko	1 Dokumen	101.016.800	0.42	100	100	100	91.97	101.016.800	92.906.900	1 Dokumen	
2.18.04.1.02.07	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Forum Fasilitas Perusahaan	1 Kali	268.840.600	1.11	100	100	100	94.01	268.840.600	252.725.450	1 Kali	
2.18.04.1.02.08	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Pemenuhan pelayanan Investor	4 Kabupaten/Kota	80.185.000	0.33	100	100	100	72.56	80.185.000	58.185.600	4 Kabupaten/Kota	
		Forum Konsultasi Publik	100 Persen	299.717.000	1.23	100	100	100	66.36	299.717.000	198.890.000	100 Persen	
		Forum Konsultasi Publik	1 Kali				0					1 Kali	
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			904.884.100	3.72	100	100	100	84.49	904.884.100	764.601.260		
2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi			904.884.100	3.72	100	100	100	84.49	904.884.100	764.601.260		

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Anggaran	Bobot	Realisasi S/D Desember						
		Sub Output	Satuan Unit			Fisik		Keuangan		Pagu Realisasi		Satuan unit
						S	R	S	R	S	R	
	Kewenangan Daerah Provinsi											
2.18.05.1.01.04	Pengawasan Penanaman Modal	Rapat Percepatan Realisasi Investasi PM	2 Kali	429.706.700	1.77	100	100	100	92.67	429.706.700	398.220.800	2 Kali
		Jumlah Perusahaan PM yang lancar melaksanakan kegiatannya (sesuai target investasi perusahaan)	300 Perusahaan				0					300 Perusahaan
2.18.05.1.01.05	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahnya	Rapat Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kepada Pelaku Usaha	1 Kali	166.157.400	0.68	100	100	100	60.96	166.157.400	101.297.000	1 Kali
		Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya di Kalimantan Selatan	1 Dokumen				0					1 Dokumen
2.18.05.1.01.06	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Bimtek Implementasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko / LKPM / Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	2 Kali	309.020.000	1.27	100	100	100	85.78	309.020.000	265.083.460	2 Kali
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			698.779.800	2.87	100	100	100	86.29	698.779.800		
2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi			698.779.800	2.87	100	100	100	86.29	698.779.800		
2.18.06.1.01.02	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kegiatan Launching Aplikasi BEKANTAN, dan High Level Meeting Investasi Kalimantan Selatan	1 Kali	698.779.800	2.87	100	100	100	86.29	698.779.800	602.950.926	1 Kali
		Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pendampingan optimalisasi pengelolaan Data dan Informasi	1 Kali				0					1 Kali
		Pengembangan dan Integrasi Aplikasi Sistem Digital	1 Dokumen				0					1 Dokumen
Total				24.319.725.900	100	100	100	100	88.65	24.319.725.900	21.559.970.371	

3. Dukungan Personil

Untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap susunan kepegawaian yang dimiliki DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan guna menunjang tugas dan fungsinya saat ini sebagai berikut :

Sumberdaya manusia pada DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Serjana S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat di tabel.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	Sekolah Dasar (SD)	-	-	-	
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	-	-	-	
3	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)	12	2	14	
4	Diploma Satu (D-I)	-	-	-	
5	Diploma Dua (D-II)	-	-	-	
6	Diploma Tiga (D-III)	4	3	7	
7	Diploma Empat (D-IV)	-	2	2	
8	Sarjana (S-1)	20	15	35	
9	Sarjana (S-2)	7	4	11	
10	Sarjana (S-3)	1	-	1	
	Jumlah ASN	44	26	70	
1	Sekolah Dasar (SD)	3	-	3	*)
2	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)	1	-	1	*)
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	5	4	9	*)
4	Diploma III (D3)	-	1	1	*)
5	Sarjana (S-1)	5	2	7	*)
	Jumlah Non ASN	14	7	21	
	Jumlah Seluruh Karyawan DPMPTSP	58	33	91	

Keterangan : *) Pegawai Penyedia Jasa Layanan Perseorangan

Dari jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 70 (tujuh puluh) orang kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat golongan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Pangkat Golongan

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
1	II/a Pengatur Muda	-	-	-	
2	II/b Pengatur Muda Tk.I	-	-	-	
3	II/c Pengatur	1	2	3	
4	II/d Pengatur Tk.I	2	-	2	
5	III/a Penata Muda	4	2	6	
6	III/b Penata Muda Tk.I	-	3	3	
7	III/c Penata	3	-	3	
8	III/d Penata Tk.I	6	5	11	
9	IV/a Pembina	6	3	9	
10	IV/b Pembina Tk.I	1	-	1	
11	IV/c Pembina Utama Tk.I	1	-	1	

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	6
12	IV/d Pembina Utama	-	-	-	
13	PPPK Penuh Waktu	5	-	5	
14	PPPK Paruh Waktu	15	11	26	
	JUMLAH	44	26	70	

Komposisi pegawai berdasarkan jabatan struktural dan fungsional untuk menentukan seberapa besar tanggung jawab yang diemban Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat dilihat pada tabel.

Komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional

No	Struktural dan Fungsional	Jumlah		Total	Ket
		L	P		
1	2	3	4	5	
1	Eselon I	-	-	-	
2	Eselon II.A	1	-	1	
3	Eselon III.A	4	2	6	
4	Eselon IV.A	2	-	2	
5	Fungsional Tertentu	8	3	11	
6	Non Struktural / Fungsional Umum	10	9	19	
7	PPPK Penuh Waktu	5	-	5	
8	PPPK Paruh Waktu	15	11	26	
	Jumlah	45	25	70	

4. Permasalahan dan Solusi

4.1 Permasalahan

Tingginya satuan harga pada DPA yang merupakan implemementasi perpres 33 pada SIPD, sehingga anggaran belanja besar. Realisasi belanja relative rendah, tetapi realisasi fisik terpenuhi. Sehingga terdapat SILPA pada anggaran tahun 2025.

4.2 Solusi

Koordinasi dengan TAPD terkait pengalokasian anggaran. Kalimantan Selatan termasuk daerah yang relatif aman dan kondusif sebagai tempat berinvestasi sekalipun ada beberapa permasalahan yang memerlukan penyelesaian yang arif dan bijaksana.

BAB IV

TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD

BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN						
NO	SKPD	PERMASALAHAN	REKOMENDASI DPRD	TINDAK LANJUT REKOMENDASI OLEH SKPD	PERMASALAHAN / HAMBATAN DALAM MENINDAKLANJUTI REKOMENDASI	SOLUSI ATAS PERMASALAHAN / HAMBATAN
20.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Realisasi anggaran DPMPTSP tahun 2024 mencapai sekitar 88,7% dari pagu anggaran perubahan, dengan program promosi penanaman modal mencapai realisasi tertinggi (96,49%) dan program pengendalian pelaksanaan penanaman modal terendah (83,79%). Perlu dilakukan evaluasi untuk meningkatkan efisiensi pada program dengan realisasi rendah agar anggaran dapat terserap optimal dan mendukung target investasi. Mengingat program promosi penanaman modal dan pelayanan penanaman modal memiliki pagu dan realisasi yang cukup besar, disarankan untuk mempertahankan atau menambah alokasi anggaran pada kedua program ini. Kegiatan promosi seperti pameran, videotron, dan baliho terbukti efektif dalam menarik investor dan perlu diperkuat. Realisasi program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal mencapai 90,4%. Mengingat pentingnya digitalisasi pelayanan perizinan berbasis risiko, anggaran untuk pengembangan sistem informasi perlu dipertahankan atau ditingkatkan untuk mendukung layanan yang lebih cepat dan transparan. Namun kendala yang sering terjadi adalah pertimbangan teknis dari dinas terkait sangat memakan waktu.	Catatan dan rekomendasi disusun berdasarkan analisis realisasi anggaran, capaian kinerja, serta identifikasi kendala dan peluang perbaikan sebagaimana tercantum dalam dokumen LKPJ 2024 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan yakni : - Memperkuat perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal dengan pendekatan strategis, termasuk fasilitasi kemitraan dunia usaha dan penyusunan peta potensi investasi yang akurat dan up-to-date. - Melanjutkan dan mengembangkan pelayanan perizinan berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik untuk mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepuasan masyarakat serta pelaku usaha serta memangkas waktu pertimbangan teknis di SKPD terkait. - Memperluas dan mengintensifkan promosi potensi daerah yang dapat menarik investasi, termasuk melalui media digital dan pameran, serta menggali potensi baru yang relevan dengan perkembangan ekonomi daerah. - Memperkuat pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data dan meningkatkan efisiensi layanan khususnya menjawab keterlambatan pertimbangan teknis yang terjadi.	- Penyusunan Rencana Strategis, Fasilitasi Kemitraan Dunia Usaha, Penyusunan Peta Potensi Investasi yg up-to-date, Pengembangan Program Insentif, Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan, Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penyempurnaan Regulasi - Semua perizinan dilakukan melalui OSS agar transparansi dan sebagai upaya pengawasan dan pengamanan harus di bentuk Lembaga Pengamanan Perizinan. - Promosi investasi akan dilakukan melalui media digital melalui penampilan video tron dan baliho di lokasi yang berpotensi investor luar negeri melihat di areal bandara soeta, bandara juanda serta bandara ngurah rai, untuk baliho akan di pasang di Jakarta, DPMPTSP juga akan membuat video potensi untuk persektor - Digitalisasi pada setiap tahapan proses perizinan di aplikasi SIMAPAN, Sebagai pelayanan publik di sektor perizinan yang sangat bergantung pada pasokan listrik dan layanan internet cepat, Pengelolaan data dan informasi masih belum optimal, termasuk penyajiannya	- Terbatasnya SDM dan Anggaran yg tersedia - Tidak adanya notifikasi/ pemberitahuan di menu oss terkait permasalahan yang masuk baik di akunt OPD Teknis dan DPMTSP, Dalam hal penerbitan pertek dan lampiran teknis, pada beberapa OPD Teknis masih memerlukan Surat Pengantar / Permohonan dari DPMPTSP, Terdapat beberapa kekeliruan pengisian data kegiatan usaha yang diisikan oleh pelaku usaha yang masuk dalam rekapitulasi perizinan berusaha yang diterbitkan oleh DPMPTSP Prov. Kalsel, contohnya pada pengisian data kegiatan usaha, tepatnya dipertanyakan "Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang berlaku efektif sebelum Implementasi UU No. 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja?" dijawab oleh pelaku usaha "Sudah" sehingga perizinan berusaha atas kegiatan usaha tersebut berstatus "Masih Berlaku" namun sebenarnya pelaku usaha tidak/belum memiliki perizinan atas kegiatan usaha tersebut - Kurangnya anggaran untuk melaksanakan promosi investasi ke daerah yang berpotensi banyak investornya - Pertek dari SKPD teknis cenderung melebihi durasi waktu yang ditentukan, operator pengelola aplikasi yang memahami aplikasi perizinan, Pelayanan akan terganggu jika aliran listrik dan layanan internet tidak lancar, Keterbatasan secara kuantitas dan kualitas SDM dalam pengelolaan, pengolahan, dan penyebarluasan data dan informasi, Sarana dan prasarana pengolahan dan penyebarluasan informasi masih terbatas	- kapasitas dan kompetensi SDM serta Meningkatkan menambah anggaran biaya. - Transparansi dan Akuntabilitas dalam proses perizinan, Tambahan menu dalam OSS - RBA supaya mempermudah pemohon izin, OPD Teknis dan DPMTSP. - Menambahkan anggaran pada bidang promosi sehingga dapat melaksanakan promosi investasi baik dalam maupun luar negeri - Penggunaan pertek secara online diharapkan dapat mempercepat proses perizinan, Diperlukan lebih banyak bimbingan teknis bagi operator pengelola aplikasi pada DPMPTSP dan SKPD teknis serta panduan penggunaan aplikasi, Perlunya penambahan jalur listrik alternatif agar pelayanan bisa terus berjalan jika terjadi gangguan, Diperlukan lebih banyak bimbingan teknis bagi operator pengelola data dan informasi serta media social, Penambahan sarana dan prasarana pengolahan dan penyebarluasan informasi terutama di media sosial

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Kalimantan Selatan sebagai instansi teknis yang melayani kegiatan Promosi, selalu berusaha untuk memanfaatkan sumber dana dan sarana yang ada dengan baik, dan berusaha melaksanakan tugas seoptimal mungkin dengan memperhatikan point-point yang dipaparkan sebelumnya, tingkat keberhasilan pencapaian pelaksanaan tugas DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan secara umum dapat dikatakan berhasil, karena target yang ada dapat dicapai dengan baik.

Penyusunan LKPJ LPPD DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 adalah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, artinya telah melaksanakan kinerja berdasarkan Rencana Strategik yang di dalamnya berisi sasaran-sasaran stratejik yang harus dipertanggung jawabkan. Sasaran stratejik tersebut merupakan gambaran tentang apa yang ingin dicapai oleh instansi pada tahun 2025 dan dituangkan dalam dokumen Perencanaan Kinerja Tahun 2025. Dengan demikian di dalam LKPJ LPPD Tahun 2025 ini DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan telah berusaha menjawab dan membuktikan bahwa amanah yang diberikan kepada instansi dapat dipertanggung jawabkan.

Dapat disimpulkan DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2025 dengan 2 (dua) indikator kinerja utama yaitu realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat (IKM). Adapun capaian realisasi investasi sebesar Rp 25.65T, sedangkan capaian nilai IKM A(91.50). Dapat disimpulkan capaian kinerja DPMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan dengan klarifikasi sangat memuaskan.

LAMPIRAN